

Latar Belakang

Forum Kebijakan mengenai UMKM Pariwisata Hijau: Mempercepat Transisi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia Menuju Net Zero

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), telah menetapkan pengembangan ekonomi hijau sebagai pilar utama dalam strategi nasional untuk mencapai Target Nol Emisi Karbon (*Net Zero Emissions*) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam kerangka ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial, mewakili lebih dari 99 persen seluruh usaha, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB Indonesia, serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Meskipun UMKM menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga menyumbang porsi signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengembangan UMKM menjadi sangat penting agar Indonesia dapat mencapai target *net-zero emissions*.

Forum ini akan berfokus pada percepatan integrasi prinsip keberlanjutan dalam UMKM pariwisata di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, upaya untuk mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan diwujudkan melalui beberapa inisiatif strategis. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan manajemen destinasi pariwisata yang efektif, penguatan industri dan rantai pasok inklusif, penerapan prinsip Ekonomi Biru-Hijau-Sirkular (*Blue-Green-Circular Economy/BGCE*), pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung kawasan pariwisata, peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata, penguatan mekanisme pembiayaan, dan strategi lainnya. Inisiatif terkini menunjukkan adanya peningkatan momentum, misalnya melalui penyusunan Pedoman Prinsip BGCE di Sektor Pariwisata oleh Bappenas dan Kementerian Pariwisata pada 2024, serta penerapan sertifikasi keberlanjutan pariwisata oleh LSPro–ISTC.

Selama tiga tahun terakhir, Kementerian Pariwisata telah bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam rangka memperkuat kapasitas menuju ekonomi pariwisata yang lebih hijau, sirkular, tangguh, inklusif, dan kaya lapangan kerja, di bawah program *Partnership for Action on Green Economy (PAGE)* Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam promosi pekerjaan hijau di sektor pariwisata berkelanjutan antara lain:

1. Pada September 2023, ILO PAGE Indonesia menyelenggarakan *Green Jobs Forum* di Manado, Sulawesi Utara, untuk merespons kebutuhan akan pariwisata berkelanjutan di wilayah sensitif keanekaragaman hayati. Forum ini melibatkan peserta dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, lembaga pariwisata, dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi menekankan pentingnya pengembangan keterampilan untuk praktik ramah lingkungan, pelestarian biodiversitas, serta penciptaan peluang kerja yang sejalan dengan target ekonomi hijau dan biru Indonesia.
2. Pada 2024, ILO PAGE Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama-sama menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers/TOT*) tentang transisi menuju ekonomi hijau dan biru, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pariwisata seperti Kemenparekraf, Politeknik Pariwisata, Badan Otorita Borobudur, perguruan tinggi pariwisata, Pokdarwis, dan Forum Komunikasi Desa

Wisata. Lokakarya TOT ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan lokal dalam menerapkan praktik berkelanjutan, mendorong pariwisata ramah lingkungan yang menciptakan lapangan kerja tanpa mengorbankan integritas lingkungan.

3. Pada 2025, ILO PAGE Indonesia dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berhasil melaksanakan rangkaian *TOT dan Training of Beneficiaries (ToB)* yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas wirausaha bisnis hijau. Inisiatif ini menghasilkan capaian penting, termasuk sertifikasi 19 pelatih serta penyusunan modul komprehensif terkait kewirausahaan, edukasi finansial, dan pariwisata hijau. Selain itu, program percontohan dilaksanakan di empat provinsi (DIY, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan NTB), melibatkan 172 UMKM pariwisata, sementara kegiatan replikasi diperluas ke 30 kota dan kabupaten, menjangkau lebih dari 900 UMKM pariwisata. Upaya ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip pariwisata hijau yang menempatkan manusia, planet, dan profit secara seimbang, sehingga membentuk fondasi yang kuat bagi model bisnis berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah melakukan *scale-up* inisiatif ini secara nasional, dengan dukungan kolaborasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Meskipun berbagai upaya strategis telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan. UMKM pariwisata menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses pembiayaan, infrastruktur yang belum memadai untuk praktik berkelanjutan, ketidakseragaman penegakan kebijakan, serta kapasitas teknis yang masih terbatas dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Dialog kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa percepatan pengembangan UMKM pariwisata hijau memerlukan aksi terkoordinasi antar lembaga pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Dengan mempertemukan para pemangku kepentingan kunci, dialog ini bertujuan membangun kesepahaman mengenai prioritas strategis, mengidentifikasi jalur implementasi yang konkret, dan membangun mekanisme kolaborasi berkelanjutan yang dapat mengoptimalkan potensi transformatif UMKM pariwisata hijau dalam perjalanan pembangunan berkelanjutan Indonesia.